

Mengatasi kemiskinan: Memahami akar masalah, tantangan global, dan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Fina Zaimatul Ummah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: finazaimatul@gmail.com

Kata Kunci:

kemiskinan; pengangguran;
faktor-faktor penyebab

Keywords:

poverty; flocking; contributing
factors

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artikel ini mengkaji akar masalah kemiskinan dengan fokus pada faktor-faktor penyebab struktural seperti ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, serta dampak kebijakan ekonomi yang tidak merata. Selain itu, artikel ini membahas tantangan global yang semakin memperburuk kondisi kemiskinan, termasuk perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, dan krisis kesehatan.

Berbagai solusi berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga diuraikan, mulai dari pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga kebijakan lingkungan yang inklusif. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif, artikel ini menyoroti pentingnya strategi yang tidak hanya fokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

ABSTRACT

Poverty is one of the greatest challenges the world faces today, affecting various aspects of social, economic, and environmental life. The article examined the root of poverty by focusing on structural causes such as inequality in access to education, health, and jobs, as well as uneven economic policy impacts. In addition, the article discussed global challenges that worsen poverty, including climate change, rapid urbanisation, and the health crisis. Sustainable solutions to poverty and improve public welfare are also described, ranging from local economic empowerment, improved education and health quality, to inclusive environmental policies. With a comprehensive and collaborative approach, the article highlights the importance of strategies that focus not only on short-term help but also on sustainable development to ensure the longterm welfare of the entire community.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah sosial yang perlu segera diatasi oleh setiap individu. Masyarakat Muslim diajak untuk bersatu melawan kemiskinan, seperti semangat yang diungkapkan oleh Ali ibn Abi Thalib. Dalam satu kesempatan, beliau menggambarkan penderitaan umat Muslim akibat kemiskinan dan mengatakan, "Jika kemiskinan bisa dilihat sebagai sosok manusia, aku akan membunuhnya." Pernyataan ini dikutip oleh Nabil Subhi al-Thawil dalam karyanya, *al-Hirman wa al-Takhalluf fi Diyar al-Muslimin*.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Saat ini, kemiskinan merupakan ujian dan penderitaan yang serius dalam kehidupan masyarakat. Banyak anak-anak yang putus sekolah, menjadi gelandangan, dan mengalami pengangguran, sementara ketidakharmonisan dalam rumah tangga juga sering muncul akibat kemiskinan. Realitas ini memerlukan penanganan yang mendesak dan solusi yang tepat. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada orang-orang yang kurang mampu, tetapi juga melibatkan mereka yang memiliki kecukupan harta (al-ghaniy) untuk berbagi sebagian kekayaannya dengan orang-orang miskin. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat, sehingga dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi kelompok masyarakat yang kurang beruntung (Ahyani, 2021).

Kemiskinan adalah fenomena yang telah ada sejak era pra-reformasi hingga masa reformasi saat ini. Masalah ini menjadi tantangan signifikan yang dihadapi pemerintah kita saat ini. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan berbagai kebijakan guna mengatasi permasalahan kemiskinan, namun masalah ini masih belum sepenuhnya teratasi. Jika kebijakan tersebut benar-benar efektif, seharusnya kemiskinan di negara kita bisa diatasi. Lalu, siapa yang bertanggung jawab dalam situasi ini? Apakah pemerintah, para pejabat, atau masyarakat? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, terutama bagi para pengamat ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penulis berusaha mengkaji berbagai masalah terkait penanganan kemiskinan di Indonesia. Salah satu penghambat dalam pembangunan ekonomi adalah pengangguran dan kemiskinan. Keduanya menjadi indikator bagi sebuah negara untuk menilai apakah pembangunan yang sedang berlangsung dapat dirasakan oleh semua warganya tanpa memandang atribut-atribut tertentu. Dengan kata lain, pembangunan harus merata di seluruh masyarakat. Kita akan menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan, terutama selama masa pandemi COVID-19 kala itu.

Kemiskinan tidak dapat dianggap sebagai masalah yang terpisah, karena ia merupakan hasil dari ketidakberhasilan dalam mencapai pembangunan yang merata. Dalam konteks ini, pengangguran dan kemiskinan akan terus meningkat seiring dengan tidak adanya pemerataan pembangunan di daerah pedesaan (Ummah, 2019).

Pembahasan

Pengertian Kemiskinan

Berbagai definisi kemiskinan telah dikemukakan dan menjadi bahan perdebatan. Kemiskinan didefinisikan secara beragam, mencerminkan spektrum orientasi ideologi yang berbeda. Pendekatan kuantitatif dalam mendefinisikan kemiskinan juga telah menjadi subjek diskusi yang luas di kalangan peneliti yang tertarik pada isu ini (Sinaga, 2022).

Parwoto (2001) menyebutkan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang dialami oleh individu atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hingga mencapai taraf yang dianggap layak. Sementara itu, menurut Sumedi dan Supadi (2000), kemiskinan terjadi akibat ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mempertahankan hidup mereka pada tingkat yang dianggap manusiawi.

Bappenas (2002) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi yang dialami oleh individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup hingga mencapai taraf yang dianggap layak. Kemiskinan mencakup dimensi politik, sosial budaya, psikologi, ekonomi, dan akses terhadap aset, di mana semua dimensi tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ravallion (2001) menjelaskan bahwa kemiskinan mencakup kelaparan, tanpa tempat tinggal, dan ketidakmampuan untuk berobat ketika sakit. Orang miskin sering kali tidak dapat membaca karena tidak bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, merasa takut menghadapi masa depan, dan kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan mencerminkan ketidakberdayaan, keterpinggiran, dan kurangnya kebebasan.

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan antara lain pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika disertai dengan pemerataan hasil di semua sektor, sangat penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran juga berperan dalam meningkatkan kemiskinan. Menurut Sukirno (2003), salah satu penentu kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat akan mencapai puncaknya jika terjadi penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Pengangguran dapat menurunkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi kesejahteraan dan memicu kemiskinan.

Faktor lain yang turut memengaruhi kemiskinan adalah inflasi dan pengeluaran pemerintah. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan tetap, sehingga menyulitkan kelompok miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah, yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal, dapat dialokasikan untuk kepentingan publik, terutama untuk membantu masyarakat miskin. Kebijakan anggaran yang tepat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan.

Tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan masalah besar berskala makro yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara agraris dengan populasi yang besar, Indonesia tidak terlepas dari tantangan kemiskinan. Jumlah masyarakat miskin yang sangat banyak, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan yang sulit dijangkau, menambah kompleksitas masalah ini.

Selama ini, upaya mengurangi kemiskinan sering dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Ada berbagai permintaan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan, baik dalam bentuk bantuan sosial, kredit modal, layanan kesejahteraan gratis, maupun bentuk bantuan lainnya. Meskipun bantuan pemerintah terus mengalir, ekonomi daerah tetap tidak berkembang. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan mengurangi kemiskinan, misalnya dengan meningkatkan kesadaran untuk berzakat (Ada'uddin & Yuliana, 2022)

Menurut penelitian (Giovanni, 2018), tingkat pengangguran memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oshima dalam (Giovanni, 2018) menyatakan bahwa hampir tidak ada rumah tangga miskin yang terdiri dari penganggur. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, tidak ada jaminan sosial bagi penganggur, sehingga orang miskin harus bekerja, meskipun tidak secara penuh setiap hari, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara teoritis, tingkat pengangguran akan berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa

jika tingkat pengangguran meningkat, tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Namun, hasil penelitian (Giovanni, 2018) menunjukkan bahwa dalam suatu rumah tangga, jika ada anggota keluarga yang bekerja dan memiliki pendapatan tinggi, maka penganggur dalam keluarga tersebut tidak dapat dianggap miskin. Ini karena keberadaan anggota keluarga yang berpenghasilan lebih tinggi dapat menjaga status ekonomi keluarga tetap di atas garis kemiskinan (Najib Putri & Yuliana, 2023)

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua negara, terutama di negara-negara berkembang dan tertinggal. Isu ini sangat kompleks dan melibatkan banyak dimensi, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, serta sistem sosial lainnya (Suharto, 2005). Menurut Kartasasmita (1996), kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan pola waktu menjadi beberapa jenis: (a) kemiskinan kronis atau turuntemurun, yang biasanya terjadi di daerah-daerah dengan sumber daya alam yang terbatas atau terisolasi (*persistent poverty*); (b) kemiskinan yang mengikuti siklus ekonomi secara keseluruhan (*cyclical poverty*); (c) kemiskinan musiman, seperti yang dialami oleh nelayan dan petani yang tergantung pada musim (*seasonal poverty*); dan (d) kemiskinan yang terjadi akibat bencana alam atau dampak kebijakan tertentu yang menurunkan kesejahteraan masyarakat (*accidental poverty*).

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti: menjadi anak bungsu, tinggal dekat dengan orang tua dan merawat mereka, tidak memiliki pekerjaan sampingan, gaji yang rendah, jam kerja yang terlalu panjang, kurangnya minat terhadap pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah, status ekonomi orang tua yang kurang baik, serta kurangnya ketekunan dan keterampilan. Sebagian besar dari faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri.

Chamsyah (2008) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara individu, tradisi keluarga, dan struktur sosial yang rumit dan modern. Individu memiliki peran utama dalam munculnya kemiskinan, sementara keluarga, sebagai unit sosial terkecil, cenderung lemah akibat pengaruh dari struktur sosial, yang menjadi faktor penyebab kemiskinan secara struktural. Faktor-faktor ini harus diperhatikan saat menangani masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi yang dialami oleh individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, dan sebuah negara juga bisa dikategorikan sebagai miskin. Untuk menghindari stigma negatif, istilah untuk negara-negara tersebut telah berganti dari "negara miskin" atau "negara terbelakang" menjadi "negara berkembang."

Menurut Munkner dan Walter (2001), kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dimensi yang berbeda, tergantung pada apakah kelompok miskin tersebut tinggal di daerah pedesaan atau perkotaan, serta struktur keluarga mereka—apakah mereka berasal dari keluarga kecil, keluarga inti, atau hidup sendiri. Beberapa pandangan mengenai penyebab kemiskinan antara lain: (a) jika kemiskinan disebabkan oleh rendahnya sumber daya dan kondisi perdagangan yang tidak menguntungkan, maka solusi yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan produktivitas, memberikan akses pasar yang lebih luas, serta menetapkan harga yang lebih adil bagi produk yang dihasilkan oleh masyarakat miskin; (b) jika faktor utama kemiskinan adalah kondisi lingkungan yang buruk, maka solusinya adalah dengan melakukan pengelolaan sumber

daya alam yang lebih baik dan menerapkan praktik ramah lingkungan; (c) jika kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi, pendidikan, pelatihan, serta bimbingan menjadi penyebab kemiskinan, maka pengembangan sumber daya manusia bisa menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut Suharto (2005), penyebab kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor, yaitu: (a) Faktor Individual, yang berkaitan dengan aspek patologis individu, seperti kondisi fisik dan psikologis yang memengaruhi mereka. Perilaku, pilihan, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan hidup juga turut berperan dalam kemiskinan yang mereka alami; (b) Faktor Sosial, yaitu kondisi lingkungan sosial yang memerangkap seseorang dalam kemiskinan, misalnya diskriminasi berdasarkan usia, gender, atau etnis. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi keluarga juga sering menyebabkan kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi; (c) Faktor Kultural, yang berkaitan dengan kondisi atau kualitas budaya yang dapat menyebabkan kemiskinan. Hal ini sering dikaitkan dengan konsep kemiskinan kultural, di mana budaya kemiskinan dipahami sebagai pola hidup yang berbeda dari masyarakat umum. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menunjukkan bahwa kalangan miskin memiliki sub-kultur tersendiri, yang ditandai dengan sikap negatif seperti kemalasan, fatalisme, kurangnya semangat berwirausaha, serta kurangnya penghargaan terhadap etos kerja; (d) Faktor Struktural, yang mengacu pada sistem atau struktur yang tidak adil, tidak inklusif, dan sulit diakses, sehingga menyebabkan individu atau kelompok terjebak dalam kemiskinan. Misalnya, penerapan sistem ekonomi neoliberal di Indonesia telah memberikan beban yang berat bagi petani, nelayan, dan pekerja sektor informal melalui pajak yang tinggi, sementara iklim investasi lebih menguntungkan pihak kaya dan pemodal asing untuk terus memperkaya diri.

Faktor-Faktor Yang Membantu Keluar Dari Kemiskinan

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan prinsip keterpaduan melalui koordinasi antara sektor pusat dan daerah. Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan mencakup: (a) pemberdayaan dan optimalisasi tenaga kerja dengan cara yang manusiawi; (b) menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (c) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka; dan (d) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Upaya ini merupakan bagian penting dalam mencapai kesejahteraan sosial secara mandiri melalui pemberdayaan dan perluasan lapangan kerja.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial setiap warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup layak dan mengembangkan diri dalam menjalankan peran sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk: (a) meningkatkan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan; (b) memulihkan fungsi sosial masyarakat agar dapat mandiri; (c) memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah kesejahteraan; (d) meningkatkan peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan; (e) mendorong partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan; serta (f) meningkatkan kualitas manajemen dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini berada di tangan pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu upaya mencapai kesejahteraan sosial adalah melalui penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, penanggulangan kemiskinan mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak memiliki, atau memiliki sumber penghidupan yang tidak mencukupi. Tujuan utama dari penanggulangan kemiskinan meliputi: (a) meningkatkan kapasitas, kemampuan dasar, serta keterampilan berusaha masyarakat miskin; (b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik yang memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka; (c) menciptakan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin memenuhi hak-hak dasarnya dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan; serta (d) memberikan perlindungan dan rasa aman kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain: (a) penyuluhan dan bimbingan sosial; (b) pelayanan sosial; (c) penyediaan akses terhadap peluang kerja dan usaha; (d) penyediaan akses terhadap layanan kesehatan dasar; (e) penyediaan akses pendidikan dasar; (f) penyediaan akses perumahan; dan/atau (g) penyediaan akses terhadap pelatihan, modal usaha, serta pemasaran hasil usaha.

Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, diperlukan komitmen kuat dari individu yang didukung oleh berbagai elemen pembangunan, seperti peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kemiskinan dapat diatasi melalui beberapa faktor penting. Salah satunya adalah adanya jaringan sosial yang dapat membuka akses ke lapangan pekerjaan, aspirasi untuk meningkatkan taraf hidup, serta pengaruh agama yang memberikan motivasi untuk berusaha. Selain itu, bantuan berupa beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dukungan finansial atau modal usaha, serta akses pendidikan yang terjangkau juga memainkan peran penting. Temuan ini menekankan bahwa mengatasi kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada individu. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan sektor swasta, dalam bentuk penyediaan beasiswa, akses pendidikan murah, dan bantuan finansial bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, upaya mengatasi kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan wawancara dengan responden, karakteristik individu sering kali menjadi penyebab utama kemiskinan, namun penyelesaiannya memerlukan dukungan dari pihak ketiga serta komitmen dari individu yang bersangkutan. Contohnya, menjadi anak bungsu, tinggal bersama orang tua, merawat orang tua yang sudah lanjut usia, atau kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung, merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan tidak dapat diatasi hanya dengan menangani masalah tersebut secara langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak seharusnya hanya berfokus pada penyebab spesifik, melainkan lebih pada upaya pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber daya yang tersedia. Hal ini mencakup penyediaan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan ekonomi yang memungkinkan individu untuk mandiri dan keluar dari siklus kemiskinan (Adawiyah, 2020)

Tantangan Global Yang Semakin Memburuk Kondisi Kemiskinan

Tantangan global yang semakin memperburuk kondisi kemiskinan bisa dijelaskan dengan cara yang lebih sederhana dan lebih detail. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang membuat masalah kemiskinan semakin sulit untuk diatasi:

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah salah satu masalah besar yang kita hadapi saat ini, dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat miskin. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai sering terjadi lebih sering dan lebih parah karena perubahan iklim. Banyak masyarakat miskin tinggal di daerah yang rentan terkena dampak ini, seperti di pinggir pantai atau daerah pertanian yang bergantung pada cuaca. Ketika terjadi bencana, mereka kehilangan rumah, ladang, atau pekerjaan, dan sering kali mereka tidak punya sumber daya untuk memulihkan keadaan. Contohnya, petani miskin yang kehilangan hasil panen karena kekeringan akan kesulitan membeli benih untuk menanam lagi di musim berikutnya, sehingga kemiskinan semakin dalam.

2. Urbanisasi yang Cepat

Urbanisasi adalah fenomena di mana banyak orang berpindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, ketika terlalu banyak orang berpindah ke kota dalam waktu singkat, sering kali pemerintah kota tidak siap menyediakan fasilitas yang memadai seperti perumahan, air bersih, atau layanan kesehatan. Akibatnya, banyak orang miskin yang tinggal di kota besar akhirnya hidup di permukiman kumuh, di mana mereka tidak punya akses ke hal-hal dasar seperti sanitasi, listrik, atau pendidikan yang layak. Misalnya, di beberapa kota besar, banyak keluarga tinggal di gubuk-gubuk di pinggir sungai yang penuh dengan sampah dan air kotor. Hal ini membuat mereka rentan terkena penyakit dan semakin sulit keluar dari kemiskinan.

3. Krisis Kesehatan Global

Pandemi seperti COVID-19 menunjukkan betapa rentannya masyarakat miskin terhadap krisis kesehatan global. Saat pandemi terjadi, banyak orang kehilangan pekerjaan karena perusahaan atau usaha tutup. Bagi mereka yang sudah miskin, kehilangan pekerjaan berarti tidak ada penghasilan untuk membeli makanan atau membayar sewa rumah. Selain itu, di banyak tempat, layanan kesehatan tidak mudah diakses oleh masyarakat miskin, sehingga ketika mereka sakit, mereka tidak bisa mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Ini bukan hanya terjadi selama pandemi COVID-19 saja, tetapi juga bisa terjadi saat ada wabah penyakit lain, seperti malaria, tuberkulosis, atau HIV/AIDS. Krisis kesehatan membuat masyarakat miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan karena mereka terus menerus menghadapi masalah kesehatan tanpa dukungan yang memadai.

4. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi adalah masalah di mana kekayaan atau sumber daya hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya, sementara sebagian besar orang lainnya hidup dalam kemiskinan. Globalisasi dan perkembangan teknologi sering kali memperlebar kesenjangan ini. Orang-orang yang kaya memiliki akses ke teknologi, pendidikan yang baik, dan peluang bisnis, sementara orang miskin tidak punya akses yang sama. Misalnya, orang kaya bisa memanfaatkan teknologi untuk membangun bisnis secara online atau berinvestasi di pasar global, sedangkan orang miskin bahkan mungkin tidak

punya akses internet atau pendidikan yang cukup untuk bersaing. Hal ini menyebabkan mereka yang miskin semakin tertinggal dan sulit meningkatkan taraf hidup mereka.

5. Konflik dan Ketidakstabilan Politik

Di banyak negara, konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik membuat masyarakat hidup dalam ketakutan dan kehilangan segalanya. Ketika terjadi perang atau kerusuhan, masyarakat sering dipaksa meninggalkan rumah mereka dan menjadi pengungsi. Mereka kehilangan pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar seperti makanan dan air. Hidup sebagai pengungsi sangat sulit karena mereka harus tinggal di tempat yang tidak menentu, sering kali dalam kondisi yang sangat buruk. Misalnya, banyak orang yang mengungsi akibat perang di Timur Tengah atau Afrika tidak punya cukup makanan atau perawatan medis, dan mereka hidup dalam kemiskinan yang sangat ekstrem. Ketika suatu negara tidak stabil secara politik, masyarakat juga sering tidak bisa menjalani kehidupan yang normal karena tidak ada jaminan keamanan atau kepastian ekonomi.

6. Krisis Pangan

Masalah kelaparan dan krisis pangan adalah tantangan besar bagi masyarakat miskin, terutama di negara berkembang. Harga makanan di pasar dunia bisa naik karena berbagai alasan, seperti perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan atau gangguan dalam rantai pasokan global. Ketika harga pangan naik, masyarakat miskin yang sudah kesulitan membeli makanan akan semakin terpuruk. Misalnya, jika harga beras atau gandum tiba-tiba naik dua kali lipat, keluarga miskin mungkin hanya bisa makan sekali sehari atau bahkan tidak bisa makan sama sekali. Krisis pangan ini juga sering kali terjadi di daerah yang mengalami kekeringan atau bencana alam, di mana tanah pertanian tidak lagi subur dan hasil panen menurun drastis.

Tantangan-tantangan global ini sangat saling berkaitan dan membuat kemiskinan semakin sulit diatasi. Masyarakat miskin menghadapi berbagai tekanan dari banyak sisi, dan tanpa intervensi yang tepat, mereka sulit untuk keluar dari situasi ini. Untuk mengatasi masalah kemiskinan secara berkelanjutan, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sendiri untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara menyeluruh.

Solusi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah langkah-langkah yang tidak hanya memberikan manfaat sekarang, tapi juga terus membawa dampak positif di masa depan. Ini penting karena kita ingin memastikan generasi mendatang tetap bisa menikmati kualitas hidup yang baik tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan sumber daya yang ada. Beberapa solusi berkelanjutan yang mudah dipahami dan bisa diterapkan, antara lain:

1. Pendidikan Yang Terjangkau Dan Berkualitas

Pendidikan adalah kunci penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika masyarakat memiliki akses ke pendidikan yang baik, mereka akan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidupnya. Contohnya, dengan pendidikan yang baik, orang bisa mencari pekerjaan yang lebih baik atau bahkan membuka usaha sendiri. Pemerintah dan masyarakat perlu memastikan

bahwa pendidikan bisa diakses oleh semua orang, tidak hanya di kota, tetapi juga di desa-desa terpencil.

2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Meningkatkan ekonomi masyarakat bisa dilakukan dengan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM). Misalnya, memberikan pelatihan kepada petani tentang cara bercocok tanam yang lebih efisien atau memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan mereka.

3. Pengelolaan Lingkungan Yang Baik

Lingkungan yang sehat adalah bagian penting dari kesejahteraan. Jika lingkungan rusak, seperti banyak sampah atau polusi, kesehatan masyarakat akan terganggu. Oleh karena itu, menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang barang-barang bekas, dan menggunakan energi terbarukan seperti tenaga matahari atau angin, bisa menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian alam.

4. Akses Kesehatan yang Mudah dan Murah

Kesehatan yang baik sangat penting untuk kehidupan masyarakat yang sejahtera. Jika orang mudah sakit karena tidak ada akses ke layanan kesehatan yang baik, tentu hal ini akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan layanan kesehatan terjangkau dan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil.

5. Melibatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Masyarakat harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka sendiri. Misalnya, jika ada rencana pembangunan di suatu wilayah, masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam diskusi untuk memastikan bahwa proyek tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini akan membuat masyarakat merasa lebih memiliki dan berkomitmen menjaga hasil pembangunan.

Dengan fokus pada solusi-solusi ini, kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memikirkan keuntungan hari ini, tetapi juga memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua orang (Rahadian, 2016)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Artikel ini menyoroti bahwa kemiskinan adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan tantangan global, seperti ketidaksetaraan akses pendidikan, krisis kesehatan, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim. Tantangan-tantangan tersebut memperburuk kondisi masyarakat miskin, membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Masyarakat miskin sering kali tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana alam, tinggal di lingkungan perkotaan yang kumuh,

dan tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Selain itu, konflik bersenjata dan krisis pangan juga semakin memperburuk kondisi mereka.

Untuk mengatasi kemiskinan, solusi jangka panjang dan berkelanjutan sangat diperlukan. Ini mencakup pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan yang inklusif dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan berkelanjutan tidak hanya fokus pada bantuan sesaat, tetapi juga memastikan kesejahteraan jangka panjang, agar masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri.

Saran

1. Peningkatan Pendidikan dan kesehatan: Pemerintah perlu memprioritaskan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil.
2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Berikan pelatihan dan akses modal agar masyarakat miskin dapat menciptakan pekerjaan dan usaha sendiri.
3. Perlindungan Lingkungan: Terapkan kebijakan yang mendukung energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan agar masyarakat lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.
4. Kolaborasi Global: Negara dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang paling terdampak oleh kemiskinan dan krisis.
5. Keterlibatan Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan solusi yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Dengan langkah-langkah ini, kemiskinan bisa diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ada'uddin, A. Y., & Yuliana, I (2022). Pengaruh Gross Domestic Product (GDP) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia dengan Zakat Distribution sebagai Variabel Moderasi pada Tahun 2011-2020. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4 (6), 1607–1614. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1032>
- Adawiyah, E (2020). Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. 1 (April), 43–50.
- Ahyani, S (2021). Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (2), 215. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11159>
- Najib Putri, R. H., & Yuliana, I (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai mediasi di Probolinggo. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (6), 2691–2700. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2531>
- Rahadian, A (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, III (01), 46–56. <https://adoc.pub/strategi-pembangunan-berkelanjutan-ah-rahadianinstitut-ilmu.html>
- Sinaga, R. V. I (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Se Sumatera. *Jurnal Implementasi Ekonomi Dan Bisnis*, 9 (1), 2217–2232. <http://repository.unib.ac.id/11025/>

Ummah, M. S (2019). Dampak Pengangguran Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya Pada Pandemi Covid-19. *Sustainability (Switzerland)*, 11 (1), 1–14.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0A>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A>